

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas laba atau penghasilan bagi perusahaan. Besarnya pajak yang dikenakan dalam suatu periode akan tergantung dua faktor yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Besarnya pajak penghasilan yang disajikan dan di laporkan dalam laporan keuangan bisnis, jelas tidak ada korelasi langsung dengan laba akuntansi. Untuk dapat menghubungkan korelasi antara pajak penghasilan dengan laba akuntansi, maka diperlukan penyesuaian terhadap pajak penghasilan antar periode.

Pada tahun 1997 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan (PPh). PSAK No.46 diberlakukan secara efektif mulai tanggal

1 Januari 1999 bagi perusahaan publik, dan mulai tanggal 1 Januari 2001 bagi perusahaan lainnya.

Sebelum diberlakukannya PSAK No.46, praktik pelaporan keuangan yang berkaitan dengan PPh berpedoman pada PSAK No.16 paragraf 77, yang memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih dan menerapkan salah satu dari dua metode akuntansi PPh. *Pertama*, perusahaan dapat menghitung PPh menurut laba akuntansi. Selisih antara beban PPh menurut laba akuntansi dengan utang pajak yang dihitung menurut laba fiskal sebagai akibat adanya perbedaan temporer pengakuan pendapatan dan beban, ditampung dalam akun “ PPh ditangguhkan” dan dilaporkan dalam neraca untuk dialokasikan pada beban PPh tahun-tahun mendatang. Metode akuntansi pajak penghasilan semacam ini disebut dengan metode alokasi pajak antar periode. Metode pajak antar periode berdasarkan PSAK No. 16 paragraf 77 ini identik dengan metode alokasi pajak antar periode yang diatur dalam APB Opinion No. 11. *Kedua*, perusahaan dapat menghitung dan melaporkan beban PPh ditangguhkan dalam neraca, sehingga tidak ada alokasi pajak pada tahun-tahun mendatang .

Harnanto (2003 : 110) menyatakan hal yang sama, bahwa metode akuntansi PPh tanpa alokasi pajak antar periode merupakan metode akuntansi yang mengakibatkan laba bersih tidak dapat merefleksikan laba yang sebenarnya, karena beban PPh yang dilaporkan tidak berkorelasi langsung (tidak *match*) dengan laba sebelum pajak. Aktiva dan kewajiban dalam neraca juga dinyatakan terlalu rendah (*understate*) sebagai akibat tidak dilaporkannya konsekuensi pajak di masa mendatang atas perbedaan temporer pengakuan pendapatan dan beban.

PSAK No. 46 diterbitkan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan. PSAK No. 46 mengatur akuntansi pajak penghasilan menggunakan dasar akrual, yang secara komprehensif menerapkan pendekatan aktiva-kewajiban (*Asset-liability approach*) atau berorientasi pada neraca (*balance-sheet oriented*). Alokasi pajak antar periode berdasarkan PSAK No. 46 adalah sama dengan alokasi pajak antar periode yang diatur dalam SFAS No. 96 .(Akhmad Riduan.2004 : 221)

Mengingat realisasi aktiva pajak tangguhan atau penyelesaian kewajiban pajak tangguhan akan terjadi di periode mendatang, maka apabila aktiva pajak tangguhan diperkirakan tidak akan dapat direalisasikan sepenuhnya maka harus diturunkan nilainya (*write down*) dengan membentuk penyisihan (*allowance*) yang dibebankan pada periode berjalan. Se jauh para manajer menetapkan lebih mungkin daripada tidak (*more likely than not*) bahwa aktiva pajak tangguhan akan direalisasi. Karena tingkat penyisihan yang tepat dari penyisihan tergantung pada ekspektasi manajer atas realisasi aktiva pajak tangguhan di masa depan, statement ini mensyaratkan para manajer menguji jumlah pertimbangan (*judgement*) yang digunakan.

Penulis akan mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Gregory S. Miller dan Douglas J. Skinner atas faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan penilaian (*valuation allowance/ VA*) untuk aktiva pajak tangguhan menurut SFAS No. 109 (mengenai akuntansi pajak penghasilan). Sampel perusahaan yang diteliti dan periode penelitian menjadi perbedaan utama replikasi penelitian ini.

Penelitian ini akan menguji apakah para manajer menetapkan cadangan penilaian menurut PSAK No. 46, pernyataan ini menunjukkan bahwa tingkat yang tepat atas penyisihan, tergantung pada kemungkinan aktiva pajak tangguhan akan direalisasi, yang berarti tergantung pada ekspektasi para manajer tentang tingkat penghasilan kena pajak di masa depan. Penelitian ini juga akan menguji apakah para manajer memanfaatkan keleluasaan mereka terhadap cadangan penilaian untuk tujuan manajemen laba. Beberapa alasan mengharapkan cadangan penilaian menjadi alat manajemen laba adalah *pertama*, tidak terdapat formula yang mapan (*established*) atau petunjuk yang jelas untuk meningkatkan tingkat cadangan yang tepat. *Kedua*, tingkat penyisihan yang tepat tergantung pada ekspektasi manajer atas laba masa depan. *Ketiga*, bagi banyak perusahaan, penyisihan ini cukup besar memungkinkan para manajer membuat penyesuaian yang material untuk laba akuntansi.

Aktiva pajak tangguhan tersebut harus dikurangi bila berdasarkan bukti yang ada, lebih mungkin daripada tidak (lebih dari 50%) bahwa sebagian atau seluruh aktiva pajak tangguhan tidak dapat direalisasi. Karena realisasi aktiva tersebut bersifat kontinjensi atas ketersediaan laba kena pajak yang tepat, maka standar juga mensyaratkan perusahaan untuk mencatat cadangan penilaian untuk mengurangi aktiva pajak tangguhan sampai pada tingkat dimana aktiva tersebut “lebih mungkin daripada tidak” untuk direalisasikan. Cadangan penilaian harus cukup mengurangi aktiva pajak tangguhan sampai pada jumlah lebih mungkin daripada tidak direalisasikan (FSAB 1992, par 17e). penyesuaian terhadap cadangan penilaian dilakukan secara langsung terhadap operasi yang

berkelanjutan pada suatu dasar setelah pajak melalui penyisihan untuk pajak tangguhan (beban pajak), sehingga mempengaruhi laba bersih.

Realisasi aktiva pajak tangguhan pada prinsipnya tergantung pada eksistensi jumlah penghasilan kena pajak (*taxable income*) yang cukup dan memiliki karakter yang tepat menurut PSAK No. 46, empat sumber *taxable income* adalah: *pertama*, pembalikan masa depan dari perbedaan sementara di masa depan, *kedua*, penghasilan kena pajak eksklusif di masa depan dari perbedaan sementara, *ketiga*, penghasilan kena pajak dalam tahun-tahun di belakang jika diijinkan oleh peraturan pajak, *keempat*, strategi perencanaan pajak. Karakter pertama dan kedua merupakan sumber penghasilan kena pajak yang penting, sementara ketiga dan keempat dibatasi oleh keadaannya.

Dua sumber utama penghasilan kena pajak menunjukkan bahwa tingkat penyisihan menurut PSAK No. 46 tergantung pada (1) penyisihan akan lebih kecil untuk perusahaan yang memiliki perbedaan sementara kena pajak yang lebih besar meskipun perbedaan sementara kena pajak harus membalik dalam periode di mana perbedaan sementara yang dapat dikurangkan membalik jika perbedaan-perbedaan kena pajak digunakan sebagai sumber penghasilan kena pajak; (2) penyisihan akan lebih kecil untuk perusahaan yang memiliki laba kena pajak yang diharapkan di masa mendatang lebih besar, meskipun laba tersebut terjadi dalam periode di mana bertepatan dengan pembalikan perbedaan-perbedaan yang dapat dikurangkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membahas dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Cadangan Penilaian Aktiva Pajak Tangguhan Menurut PSAK No. 46 (Studi Empiris Pada Laporan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta).**

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas, maka penulis menetapkan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah perusahaan dengan pajak tangguhan bersih yang lebih besar memiliki cadangan penilaian yang lebih kecil ?
2. Apakah perusahaan dengan laba kena pajak yang diharapkan dimasa mendatang yang lebih besar memiliki cadangan penilaian yang lebih kecil?

C. Pembatasan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar tidak terlalu luas, maka penulis membatasi pada laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2002, 2003 dan 2004 yang cakupan pembahasannya menitikberatkan pada kebijakan pembukuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan beberapa prinsip akuntansi diterima umum, serta sebagian besar perusahaan di Indonesia telah menerapkan PSAK No. 46 tersebut dan masih *up-date*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk “Menemukan bukti empiris pengaruh pajak tangguhan bersih dan laba kena pajak yang diharapkan di masa mendatang, terhadap cadangan penilaian aktiva pajak tangguhan”.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi teoritis maupun praktis. Implikasi teoritis diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) memberikan dasar untuk menilai PSAK No.46 telah berhasil memperbaiki kualitas pelaporan keuangan atau belum; (2) memperkuat sintesis dalam literature akuntansi yang menyatakan bahwa metode akuntansi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laba akuntansi : dan (3) bahan masukan bagi dewan standar akuntansi keuangan IAI maupun BAPEPAM untuk mengevaluasi persyaratan pengungkapan wajib yang berkaitan dengan PPh.

Beberapa implikasi praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi akuntan publik untuk menyajikan pengungkapan yang cukup dan penjelasan secara memadai tentang beban dan penghasilan pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi, melebihi pengungkapan wajib yang disyaratkan oleh PSAK No.46 dan BAPEPAM, (2) memberikan petunjuk bagi manajemen tentang perlunya kemampuan manajemen untuk mengelola perbedaan temporer (dalam pengakuan pendapatan dan beban) sedemikian rupa sehingga laba akuntansi tetap dipersepsikan berkualitas atau direspon positif oleh

investor; (3) bahan pertimbangan bagi manajemen untuk memilih dan menerapkan metode-metode akuntansi yang menghasilkan perbedaan temporer yang menguntungkan posisi perusahaan dalam menghadapi persepsi publik, khususnya investor.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyajian dari dalam bentuk skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel, dan analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis data melalui pengumpulan data yang diperoleh dari laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.

BAB V : PENUTUP DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang mengikhtisarkan kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diperlukan.